

PENGARUH HASIL PAJAK DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN NATUNA

Wan Rio Putra Pratama

1215182925

Program Studi: Ekonomi Syariah STAI Natuna

Email: riowanputra@gmail.com

Kartubi

2120047301

Program Studi: Ekonomi Syariah STAI Natuna

Email: kartubi1973@gmail.com

Said Muhammad Rahimin

2105057201

Program Studi: Ekonomi Syariah STAI Natuna

Email: saidrahiminatuna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Analisis data menggunakan metode regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki hubungan yang lemah hanya sebesar 0,299 dan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 8,9 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna sedangkan 91,1 persen dipengaruhi oleh variabelnya di luar penelitian. Studi ini memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Natuna dalam memahami pengaruh hasil pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kunci: pajak daerah, pertumbuhan ekonomi daerah

Abstract

This study aims to analyze the effect of regional tax revenues on economic growth in Natuna Regency using secondary data from the Central Bureau of Statistics and Bank Indonesia. Data analysis used a simple linear regression method. The results showed that local taxes had a weak relationship of only 0.299 and had a positive and significant effect of 8.9 percent on economic growth in Natuna Regency, while 91.1 percent were influenced by variables outside the study. This study contributes to the government of Natuna Regency in understanding the effect of regional tax revenues on economic growth.

Key: local tax, economic growth, region

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang luas tentang bagaimana kehidupan masyarakat berkembang secara ekonomi. Faktor ekonomi dalam suatu negara mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan terus-menerus bergerak menuju keadaan yang lebih baik untuk jangka waktu tertentu. Ekonomi suatu negara menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, yang merupakan tanda pertumbuhan ekonomi (Nuraini, 2017).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 5,78% dasar evolusi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penurunan konsumsi rumah tangga. Orang-orang berhenti dari pekerjaan mereka karena kenaikan harga pangan, yang berdampak pada pengeluaran. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia juga berdampak pada daerah, salah satunya Kabupaten Natuna.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Natuna dapat dilihat bahwasanya dalam perekonomian Kabupaten Natuna mengalami percepatan pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan Kabupaten Natuna mencapai 6,09 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,82%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Enceran seperti reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,08%. Sedangkan secara umum seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,02% disektor migas. Jika tanpa migas, nilai PDRB Kabupaten Natuna atas dasar harga konstan 2010, hanya bertambah 5,2 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sehingga tumbuh sebesar 0,12%. Sepanjang tahun 2021, ada 15 kategori yang mampu tumbuh positif dan 2 yang mengalami kontraksi. Yang mengalami pertumbuhan tertinggi diatas 5% diantaranya adalah kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,43%. Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 7,42%, dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,58% dan kategori Konstruksi sebesar 4,52%.(BPS, 2022)

Berdasarkan otonomi daerah, peraturan pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009. Ini adalah langkah yang diperhitungkan untuk memperkuat stabilitas kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.(Bambang Saputra, 2012).

Pemerintah daerah bertugas mengelola dan memanfaatkan potensi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Natuna. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini dapat dibagi menjadi dua kelompok: pajak daerah, yang dikendalikan oleh undang-undang setempat, dan pajak negara, yang diatur dan diterapkan secara lokal. Pungutan ini berlaku untuk semua subjek pajak, termasuk orang, badan, dan barang bergerak maupun tidak bergerak. Namun demikian kendala dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berasal dari faktor penghambat internal dan eksternal. Langkah optimalisasi guna menghilangkan faktor penghambat tersebut adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi melalui perbaikan organisasi dan perangkatnya, perbaikan administrasi operasional dan penatausahaan, peningkatan pengendalian dan pengawasan. Ekstensifikasi dilakukan melalui pendataan dan pemetaan yang akurat serta perluasan wajib pajak daerah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. (Bambang Sambodo dan Febriyanti Rahmi Putri, 2020)

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah (Brahmantio, 2002). Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan; Untuk kepentingan

jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat. (Mardiasmo, 2006)

Penerimaan pajak daerah kabupaten Natuna tahun 2016-2021 terus meningkat sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna. Dilihat dari realiasi penerimaan pemerintah Kabupaten Natuna dari 6 tahun terakhir. Dimana pajak daerah ini mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 pajak daerah naik sebesar 104,39% menjadi Rp.18.763.679.718,- kemudian di tahun 2018 turun sebesar 27,15% menjadi Rp.13.668.947.570,-. Sementara itu di tahun 2019 penerimaan pajak daerah meningkat kembali sebesar 10,47% menjadi 15.099.517.920,- namun demikian pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah Kabupaten Natuna turun kembali sebesar 23,54% dan naik kembali di tahun 2021 sebesar 13,77% menjadi Rp.13.134.288.230,-. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Natuna dari tahun 2016-2021 bergerak secara fluktuatif dengan kenaikan terbesar di tahun 2017 yaitu sebesar 104,39% dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 27,15%. Berikut penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 yang dapat dilihat di table di bawah ini:

Tabel 1

Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Natuna
(ribu rupiah), Tahun 2021.

Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan 2021	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pajak Hotel	132.288.120	1,01
Pajak Restoran	2.244.780.360	17,09
Pajak Hiburan	11.462.800	0,09
Pajak Reklame	82.488.000	0,63
Pajak Penerangan Jalan	4.480.909.990	34,12
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	2.852.380.780	21,72
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	453.821.910	3,46
Pajak Parkir	6.042.000	0,05
Pajak Air Tanah	2.900.000	0,02
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.579.061.060	12,02
Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	1.288.153.210	9,81
Jumlah/Total	13.134.288.230	100,00

Sumber: BPS Natuna Dalam Angka 2022

Dari table dapat dilihat beberapa jenis pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak BPHTB dan Pajak PBB. Dari data diatas dapat dilihat penerimaan pajak daerah menurut jenis pajak daerah di Kabupaten Natuna yang tertinggi pada tahun 2021 adalah pajak penerangan jalan dengan penerimaan berjumlah Rp. 4.480.909.990.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah yang memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Kabupaten Natuna untuk lebih bijak dalam melakukan

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pergerakan pertumbuhan ekonomi daerah, mencerminkan adanya kegiatan perekonomian daerah sehingga daerah diharapkan dapat lebih mengenal potensi dan kebutuhan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya ekonomi.

Peningkatan Pajak Daerah harus berdampak pada perekonomian daerah, Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi pajak daerah terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan

peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri.

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat, menurut sebagian ulama berlandaskan pada firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ء (النساء: 4/59)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa: 59).
Terjemahan Kemenag 2019

Sejarah Islam mencatat, perkembangan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam. Pada jaman pertengahan ternyata peran fiskal sangat penting untuk menunjang kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Pada zaman tersebut bagaimana Rasulullah SAW menerapkan tentang *ghanimah*, *jizyah*,

ushr, *al-kharaj* dan *adhdharibah*. Semua tersebut merupakan sumber pendapatan negara yang sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Islam. Berdasarkan beberapa gagasan yang telah diuraikan di atas, tampaknya peran pajak daerah dalam suatu perekonomian daerah sangat tinggi, tanpa hasil dari pajak daerah akan sulit mengembangkan perekonomian daerahnya, maka peneliti terdorong untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh hasil pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna.

B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan dimensi kausal korelasi (*causal effect*), yaitu penelitian berdasarkan data untuk menunjukkan secara praktis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.(Sugiono, 2013)

Penelitian intinya untuk membuktikan kebenaran serta pemecahan atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan suatu metode yang sempurna serta relevan untuk tujuan tersebut, dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan inovasi yang dapat dicapai (diperoleh) melalui teknik statistik atau dari kuantifikasi dianggap sebagai penelitian kuantitatif, atau QR (pengukuran). Dalam studi ini, penelitian kuantitatif digunakan untuk menyelidiki bagaimana hasil pajak daerah mempengaruhi ekspansi ekonomi Kabupaten Natuna.

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Pada penelitian ini menggunakan instrumen dokumentasi dan data sekunder.

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki hal-hal berupa transkrip, catatan, buku, surat, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip, jurnal, video dan sebagainya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari situs web, dan informasi yang dianggap relevan dengan alat berupa laptop yang digunakan untuk mengakses data yang berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Natuna dengan alamat web natunakab.bps.go.id.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari sumber data sekunder, yang meliputi pengumpulan, pencatatan, pengunduhan, dan pengolahan informasi yang relevan dengan penyelidikan, yaitu: (a). Data penerimaan pajak daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 s/d 2021; (b). Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2016 s/d 2021

Informasi sekunder diperoleh dari sumber tertulis, jenis penelitian sebelumnya yang serupa, buku, jurnal, artikel, situs web, dan informasi yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas. Sedangkan Teknik analisis data adalah Uji statistik deskriptif untuk mendeskripsikan variabel-variabel pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan untuk pengujian data

menggunakan analisis regresi menurut Sugiono.

1. Analisis Regresi

Merupakan analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel bebas (variabel independen) terhadap terikat (variabel dependen).

Rumus regresi Linear sederhana: $Y = a + bX$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna

a = Pertumbuhan Ekonomi

b = koefisien regresi

X = Hasil Pajak Daerah

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan (kuat-lemahnya) hubungan antara hasil pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi, tanpa memandang bentuk hubungannya, apakah linier atau non linier. Untuk melihat kuat-lemahnya hubungan antara kedua variabel tersebut digunakan koefisien korelasi.

Rumus Korelasi:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n(\sum x^2) - (\sum x)^2) \cdot (n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

x = Hasil Pajak Daerah

y = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna

r_{xy} = Koefisien korelasi antara Hasil Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

$\sum xy$ = Jumlah perkalian antara Hasil Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

$\sum x^2$ = Jumlah dari kuadrat nilai X

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat nilai Y

$(\sum x)^2$ = Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan

$(\sum y)^2$ = Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan

3. Koefisien Determinan

Koefisien Determinasi adalah koefisien yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan dari variabel dependen. Untuk mengetahui perubahan tersebut maka menggunakan

perhitungan dengan rumus koefisien determinansi:

$$KD = 1 - r^2 \times 100\%$$

A. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna

Penyajian data berdasarkan uraian tedahulu bahwa yang menjadi objek peneltian adalah mengenai pengaruh hasil pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Data Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

No	Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan Ekonomi
1	2016	9.180.404.570	6,09
2	2017	18.763.679.718	5,68
3	2018	13.668.947.570	4,48
4	2019	15.099.517.920	5,95
5	2020	11.545.052.220	-2,93
6	2021	13.134.288.230	0,12

Sumber: BPS. Natuna Dalam Angka

2. Analisis Data

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Merupakan analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih

variabel bebas (variabel independen) terhadap terikat (variabel dependen). Dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan: Y = Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna

a = Pertumbuhan Ekonomi

b = koefiien regresi

X = Hasil Pajak Daerah

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{(n \sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Untuk mengetahui pengaruh variabel hasil pajak daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna (Y) dengan perhitungan mencari koefisien regresi sebagai berikut:

$$b = \frac{6(281.31) - (81.39)(19.39)}{6(1,156.99) - (81.39)^2}$$

$$b = \frac{(1.687,86) - (1.578,1521)}{(6.941,94) - (6.624,3321)}$$

$$b = \frac{(109,7079)}{(317,6079)} = 0,35$$

Untuk mencari konstansta maka digunakan dengan perhitungan sebagai berikut:

a

$$= \frac{(19,39) \cdot (1,156.99) - (81.39) \cdot (1,156.99)}{6.1,156.99 - (81,39) \cdot (81,39)}$$

$$a = \frac{22,434.01 - 22,896.72}{6,941.93 - 6624.6398}$$

$$a = \frac{-462.70}{317.29}$$

$$a = -1,46$$

Sehingga persamaan regresinya adalah: **Y= -1,46 + 0,35X**

b. Uji Koefesien Korelasi

Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara satu variabel atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan antara dua variabel yaitu X dan Y. berdasarkan dari data Natuna Dalam Angka 2022 yang sudah diambil maka peneliti mengelola hasil tersebut dalam sebuah tabel, seperti dibawah ini:

Tabel 3

Tabel Bantu Analisis Korelasi Variabel Hasil Pajak Daerah (X) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna (Y).

n	X	Y	XY	X2	Y2
Tahun	Pajak Daerah	Pertumbuhan Ekonomi			
2016	9.18	6.09	55.91	84.28	37.09
2017	18.76	5.68	106.58	352.08	32.26
2018	13.67	4.48	61.24	186.84	20.07
2019	15.10	5.95	89.84	228.00	35.40
2020	11.55	-2.93	-33.83	133.29	8.58
2021	13.13	0.12	1.58	172.51	0.01

6	$\sum x = 81.39$	$\sum y = 19.39$	$\sum xy = 281.31$	$\sum x^2 = 1,156.99$	$\sum y^2 = 133.42$
---	------------------	------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Sumber: Olahan Data

Dari tabel 3 diketahui bahwa :

$$\begin{aligned}
 n &= 6 \\
 x &= 81.39 \\
 y &= 19.39 \\
 \sum xy &= 281.31 \\
 \sum x^2 &= 1,156.99 \\
 \sum y^2 &= 133.42
 \end{aligned}$$

Untuk memahami hubungan atau pengaruh variabel hasil pajak daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna (Y) maka digunakan analisis korelasi dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n(\sum x^2) - (\sum x)^2) \cdot (n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}} \\
 r_{xy} &= \frac{6 \times 281.31 - (81.39)(19.39)}{\sqrt{(6(1,156.99) - (81.39)^2) \cdot (6(133.42) - (19.39)^2)}} \\
 r_{xy} &= \frac{109.70}{\sqrt{(6(156.99) - (424.56))}} \\
 r_{xy} &= \frac{109.70}{\sqrt{134,711.30}} \\
 r_{xy} &= \frac{109.70}{367.03} \\
 r &= 0,299
 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari perhitungan diatas diperoleh nilai $r = 0,299$ karena besarnya r berada pada $0,20-0,399$ (Sugiono,2013) yang menunjukkan nilai penafsiran koefisien korelasi antara hasil pajak daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna (Y) adalah rendah, artinya hasil pajak daerah memberikan pengaruh yang rendah dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna.

c. Koefisien Determinan

Untuk mengetahui besarnya pengaruh hasil pajak daerah terhadap

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna, dapat diketahui dari hasil perhitungan koefisien determinasi menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus: $KD = r^2 \times 100\%$

Jika $r = 0,299$

Maka perhitungan koefisien determinan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 KD &= (0,299)^2 \times 100\% \\
 KD &= 0,0894 \times 100\% \\
 KD &= 8,9 \\
 \text{Maka:} \\
 KD &= 1 - r^2 \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$KD = 1 - 0,0894$$

$$KD = 0,91 \times 100\%$$

$$KD = 91,1$$

Berdasarkan hitungan di atas dapat dilihat bahwa besarnya pengaruh hasil pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna adalah $100 - 8,9 = 91,1\%$ Artinya bahwa hasil pajak daerah 8.9% mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna. Sedangkan sisanya 91,1% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

3. Analisa Pengaruh Hasil Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna

Salah satu kriteria untuk meneliti potensi pajak daerah adalah elastisitas. Elastisitas dapat dengan mudah diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau GNP. (Davcy, 1988). Sementara hasil penelitian (Aloysius G. Brata, 2003) tentang komposisi penerimaan pemerintah daerah (Pemda Tingkat I) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional Indonesia memberikan indikasi adanya disparitas pada komponen-komponen penerimaan kendati tingkat ekonominya seimbang. Terdapat tiga dasar basis (Musgrave, Richard A Musgrave, 1991) penerimaan pemerintah yang bersumber dari sector pajak yaitu pajak daerah maupun pajak pusat yang berbasis pendapatan dan perusahaan (*income and corporate*), konsumsi (*consumption*), dan kekayaan

(*wealth*). (Musgrave, Richard A Musgrave, 1991)

Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat jumlahnya bertambah sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Berkelanjutan

pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat (Nurfajriyanti Idham, Een N. Walewangko, 2021).

Menurut (Kuznet, 1955), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan bermacam jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. (Jhingan, 2002)

Sehubungan dengan peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (Muller, Stephen M., Russek, 1997), meneliti pengaruh struktur fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah di Amerika Serikat. Pertama, meningkatkan surplus anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, bila pengeluaran untuk pendidikan atau

transportasi public dapat ditekan atau *corporate income tax* ditingkatkan. Kedua apabila sales tax lainnya digunakan untuk *transfer payment*, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, tapi apabila *corporate tax* digunakan untuk *transfer payment* maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Ketiga pajak akan berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan Negara digunakan untuk membiayai pendidikan, transportasi public dan keamanan public.

Berdaskan hasil perhitungannya sebelumnya diketahui bahwa Pengaruh besarnya pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna dapat dilihat dari regresinya yaitu: $Y = -1,456 + 0,346X$.

Persamaan regresi dari penelitian ini adalah $Y = -1,456 + 0,346$ Nilai konstanta sebesar -1,456 mengandung arti bahwa jika nilai jumlah Hasil Pajak Daerah adalah sebesar 0, maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna akan sebesar -1,456 (tetap). Nilai Koefisien regresi X sebesar 0,346, mengandung arti bahwa jika jumlah Hasil Pajak Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna naik sebesar 0,346.

Nilai t hitung Hasil Pajak Daerah adalah 0,626. Nilai t table 2,77465 yang diperoleh dengan nilai alpha 5%. Pada sisi lain nilai signifikannya X (sig) 0,859 atau lebih besar dari alpha sebesar 0,05. Oleh karena itu t hitung lebih kecil dari t table, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti Hasil Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna.

Bersadarkan dari hasil uji koefisien korelasi adalah sebesar 0,299. Besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara Hasil Pajak Daerah sebagai variable bebas dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Sebagai variable terikat adalah sangat lemah dan negative. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,089 atau 8,9 persen. Besaran nilai koefisien determinasi sebesar 8,9 persen mengandung arti bahwa kontribusi atau sumbangan variable Hasil Pajak Daerah bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna sebesar 8,9 persen, sedangkan sisanya 91,1 persen di sumbangkan oleh variable lain. Misalnya seperti investasi, belanja pemerintah dan lain sebagainya. Sedangkan dari hasil penelitian Muhammad Hidayat, Lapeti Sari, dan Nobel Aqualdo yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru bahwasannya PMDN, Ekspor, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur (Jalan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Bersadarkan hasil uji hipotesa ini menunjukkan nilai t-hitung Hasil Pajak Daerah adalah sebesar 0,626 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,565. Maka hipotesa H di tolak atau menerima hipotesa A. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hasil Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurianto dan Akhmad Tantowi bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesenambungan penerimaan pajak daerah diperlukan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.(Yurianto, 2021)

4. Perspektif Ekonomi Islam Atas Pengaruh Hasil Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna

Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, hasil pajak daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten Natuna salah satunya dengan cara memperkuat sektor publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan fasilitas publik, seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang dapat membantu upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Isu pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian para praktisi pemikiran ekonomi Islam klasik. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan terus menerus dari faktor-faktor produksi yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Jadi, economic growth dalam Islam adalah tentang masalah nilai. Peningkatan faktor-faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut mencakup, misalnya, komoditas yang telah terbukti memiliki efek berbahaya dan merugikan bagi manusia. (Al-Tariqi, 2004)

Selain itu, dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memastikan bahwa

hasil pajak tersebut diterima dan digunakan dengan adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa hasil pajak daerah tidak hanya digunakan untuk kepentingan tertentu, tetapi juga diterima dan digunakan oleh semua elemen masyarakat, terutama oleh mereka yang tidak mampu.

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu pemerintah harus berkomitmen untuk terus meningkatkan pemabngunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.(Gultom, 2020) Dengan demikian, hasil pajak daerah akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Natuna. Hasil pajak yang digunakan secara efisien dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dilihat dalam firman Allah SWT pada Qs. An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النساء/4: 58)

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Terjemahan Kemenag 2019)

Dari ayat diatas ini tidak hanya ditunjukkan untuk para pemegang kekuasaan, melainkan juga kita semua, agar dapat menjaga amanat yang sudah diberikan. Amanat berkaitan dengan keadilan dalam memenuhi hak orang lain, seperti tak mengurangi timbangan dalam berniaga dan pajak yang dibayar oleh masyarakat agar dapat bermnanafaat untuk kemaslahatan umat.

Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara atau wilayah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif Islam, aspek pembangunan tentu mempunyai karakteristik dan orientasi yang berbeda dengan pembangunan dalam ekonomi konvensional. Islam memandang bahwa tidak hanya pembangunan secara material saja yang penting, tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral juga sangat penting. Karena pembangunan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu, yaitu dunia dan akhirat.

Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada; pertama, pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal dan sebaik mungkin. Kedua, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqâshid syarīah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *falāh* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Muhammad Akram Khan (1994) menjelaskan bahwa *falāh* meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar. Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
(المالك/67: 15)

Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Terjemahan Kemenag 2019)

Ayat ini mengandung makna bahwa secara umum, bagaimana kewajiban mengeluarkan biaya dan membangun fasilitas yang mendukung keberhasilan

tersebut. Sudah sangat jelas bahwa dalam Islam pembangunan juga menjadi perhatian penting dalam memajukan peradaban. Maka juga akan memberikan dampak yang positif terhadap sektor-sektor ekonomi seperti, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industry pengolahan, pengadaan listrik, pengadaan air, kontruksi, perdagangan besar, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, dapat dinyatakan Hasil Pajak Daerah memberikan pengaruh yang rendah dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikan yang diperoleh lebih besar dari standar yang digunakan yaitu 0,859 lebih besar dari 0,05. Hasil Pajak Daerah hanya memiliki hubungan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 8,9 persen. Sedangkan 91,1 persen di pengaruh oleh variabel diluar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. *Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Al-Tariqi, A. A. H. (2004). *Ekonomi*

Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan. Magistra Insania Press: Yogyakarta.

Aloysius G. Brata. (2003). Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi. *Jurnal Ekonomi*, Vol. II, N.

Bambang Sambodo dan Febriyanti Rahmi Putri. (2020). Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(ISSN2301-6965 : E-ISSN 2614-0241), 205–210. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.758>

Bambang Saputra. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *JAAI, VOLUME 16*(1993), 185–199.

BPS. (2022). *PDRB Kabupaten Natuna 2016-2021*. BPS KABUPATEN NATUNA. natunakab.bps.go.id

Brahmantio. (2002). Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor Pendidikan di kota Surakarta). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Vol 6 No.1.

Davcy, K. . (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah. Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Gultom, R. Z. (2020). Rifyal Zuhdi Gultom. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534), 203–211.

- Jhingan, M. L. (2002). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuznet, S. (1955). *Economic Growth and Income Inequality*. The American Economic Review. American.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan* (Edisi Revi). Andi Offset. Yogyakarta.
- Muller, Stephen M., Russek, F. S. (1997). fiscal Structures and economic Growth at The State and Local Level. *Public Finance Review*, Vol. X25 N.
- Musgrave, Richard A Musgrave, P. B. (1991). *Public Finance in Theory and Practise*. Mc Graw Hill Book Company.
- Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *FEB Unikama*, Vol. 4 No.(ISSN: 2302-7169), 79–93.
- Nurfajriyanti Idham, Een N. Walewangko, H. F. D. S. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tidore Kepulauan Dan Kota Ternate (2010-2019). *J.D. Tambayong., S.L. Mandey., I.W.J. Ogi., ISSN 2303-1174*.
- Sugiono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Cetakan ke). ALFABETA CV.Bandung.
- Yurianto, A. T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Peerumbuhan
- Ekonomi DKI Jakarta. *Journal Of Applied Business and Economics (JABE)*, Vol. 7 No(4336-449.).